Dalam Pelaporan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Provinsi Jawa Barat Pemerintah Provinsi APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 30,540 Trilyun. Pendapatan asli daerah sebesar Rp 16,524 Trilyun. Pengalokasian anggaran untuk memenuhi belanja yang presentasinya telah di tentukan dalam peraturan perundang undangan.

Kepemerintahan yang baik *(good governance)* merupakan isu sentral yang palimg mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi. Pola lama penyelenggaraan pemerintah, kini tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspons oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujud nya penyelenggaraan pemerintah yang baik.

*Good Governance* yang dimaksud merupakan proses penyelenggaraan kekuasan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service* disebut *governance* (pemerintah atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “*good governance*” (kepemerintahan yang baik). Agar “*good governance*” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak,yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya *“alignment”* (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Efektivitas di dalam pekerjaan pemerintah adalah suatu tujuan atau sasaran yang telah tercapai sesuai dengan rencana adalah efektif, tetapi belum tentu efisien. Suatu pekerjaan pemerintah sekalipun tidak efisien dalam arti input dan output, tetapi tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan masyarakat banyak, baik politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Efektivitas adalah ukuran atau kualitas keberhasilan kerja yang dicapai pegawai. Seseorang pegawai dinyatakan bekerja efektif jika ia mampu mencapai tujuan dengan cara yang lebih baik dari standar yang telah ditetapkan.

Efektivitas kerja pegawai dapat ditentukan dengan membandingkan antara waktu kerja yang telah ditetapkan dengan waktu yang dibutuhkan pegawai, dan juga dapat dibandingkan antara hasil atau kualitas yang dicapai dengan kualitas yang telah ditetapkan. Jika pelaksanaan kerja yang dilakukan pegawai lebih baik dari yang ditetapkan maka pegawai tersebut tergolong sebagai pegawai yang efektif.

Berdasarkan penjajagan penelitian pada tanggal 22 sampai 26 Januari 2017, peneliti menemukan proses pengelolaan keuangan dalam hal bantuan keuangan provinsi jawa barat yang masih tidak sesuai dengan tupoksinya dan efektivitasnya masih rendah beberapa masalah diantaranya :

1. Standar waktu yang di capai dalam melaksanakan proses memverifikasi dan menyelesaikan tugas mengenai penegelolaan bantuan dana sosial pegawai kurang cepat dan tepat waktunya.
2. Hasil yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tupoksi pegawai contohnya dalam melaksanakan tugas memverifikasipegawai di tuntut untuk menyelesaikan proses verikasi berkas dana bantuan sosial yang di jadwalkan selesai 2 minggu, pada kenyataan pegawai menyelesaikannya dalam waktu satu bulan, hal ini berpengaruh kepada hasil yang kurang sesuai.

Masalah diatas, peneliti menduga disebabkan oleh *good governace*, hal ini terlihat dari :

1. Transparansi, ini dimaksud terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah provinsi Jawa Barat. Serta tidak adanya laporan berkala mengenai pendayahgunaan sumber daya dalam perkembangan proyek keuangan dan aset yang dapat di akses oleh umum.
2. Akuntabilitas, yang dimaksud konsep ini itu dalam pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat kepada publik sebagaimana halnya pada pemilik kepentingan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti ingin mengetahui Hubungan Good Governance dengan Efektivitas Kerja Pegawai pada Bagian Sekretariat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan judul : **“HUBUNGAN *GOOD GOVERNACE* DENGAN EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA BAGIAN SEKRETARIAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA BARAT”**

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, yang dijadikan pernyataan masalah (*problem statement*) dalam penelitian ini adalah : Efektivitas Kerja Pegawai masih belum efektif.

Berpedoman pada problem statament tersebut, dapat diidentifikasikan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Good Governance dan Efektivitas Kerja pada Bagian Sekretariat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat ?
2. Bagaimana hambatan antara Good Governance dengan Efektivitas Kerja Pegawai pada Bagian Sekretariat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat ?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi antara Good Governance dengan Efektivitas Kerja Pegawai pada Bagian Sekretariat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat ?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
	1. Mengetahui bagaimana *Good Governance* pada Bagian Sekretariat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.
	2. Mengetahui bagaimana Efektivitas Kerja Pegawai pada Bagian Sekretariat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.
	3. Mengetahui bagaimana hubungan *Good Governance* dengan Efektivitas Kerja Pegawai pada Bagian Sekretariat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian terdiri dari kegunaan teoritis yang berdasarkan sumbangan Kontekstual dan Konseptual dan Kegunaan praktis untuk perbaikan lembaga yang bersangkutan. Kegunaan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis, yaitu untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan mengenai teori- teori *good governance* dan efektivitas kerja pegawai, serta hubungan *good governance* dengan efektivitas kerja pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kegunaan Praktis, yakni Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan sumbang saran bagi Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah Provinsi Jawa Barat. Mengenai hubungan *good governance* dengan efektivitas kerja, dan juga bagaimana memberdayakan pegawai agar sistem pemerintahan nya baik.
3. **Kerangka Pemikiran**

Bertitik tolak dari latar belakang serta perumusan masalah, peneliti menggunakan kerangka fikir yang dijadikan landasan teori, dalil,dan dapat dari vakar berhubungan dengan variable yang menjalin kajian dalam pelaksanaan penelititan, yakni: *Good Governance* (variabel bebas) dan Efektivitas Kerja Pegawai (variable terikat).

Koiman (2009:273), *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaanperbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. *Governance* merupakan proses lembaga-lembaga pelayanan , mengelola sumber daya publik dan menjamin realita hak azasi manusia. Dalam konteks ini good governance memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintahan hukum.

OECD dan World Bank (Sedarmayanti, 2012:4), *Good Governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta pendiptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

Dokumen United Nation Development Program (UNDP: 2004), tata kelola pemerintahan yang baik adalah

**“Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat“.**

Interaksi dan kemitraan seperti ini biasanya baru dapat berkembang subur apabila prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan dengan baik. Menurut United Nation Development Program (UNDP) prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) adalah sebagai berikut :

* + - 1. **Partisipasi (*participation*)**
			2. **Kerangka Hukum (*Rule of law*)**
			3. **Transparansi (*Transparency*)**
			4. **Tanggung Jawab (*Responsiveness*)**
			5. **Berorientasi Konsesus (*Consensus orientation*)**
			6. **Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)**
			7. **Akuntabilitas (*Accountability*)**
			8. **Visi Strategis ( *Strategic Vision*)**

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang kontruktif diantara ketiga domain; negara, sektor swasta dan masyarakat. Oleh karena dalam pengelolaa pemerintahan harus berkaitan dengan efektivitas kerja pegawai supaya dapat saling berkesinambungan.

Selanjutnya peneliti kemukakan pengertian Efektivitas **Dunn** diterjemahkan oleh **Wibawa (2003:498)** adalah :

**“Efektivitas adalah suatu kriteria untuk menyeleksi berbagai alternative dijadikan rekomendasi di dasarkan pertimbangan apakah yang di rekomendasiakan tersebut memeberikan (akibat) yang maksimal.”**

Selanjutnya peneliti kemukakan pengertian efektivitas kerja **Siagian (1999:151)** sebagai berikut:

**“Efektivitas kerja adalah penyelesaian ppekerjaan tepat pada waktunya yang telah ditetapkan, artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan, dan tidak terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakanya dan berapa biaya yang di keluarkan untuk itu.”**

Sedangkan dalam penetapan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dalam meningkatkan efektivitas **Siagian (1998:151)** adalah sebagai berikut:

1. **Standar waktu yang telah ditentukan**
2. **Hasil pekerjaan yang di capai**
3. **Biaya pengeluaran sesuai dengan rencana**

Dari pemikiran para pakar diatas peneliti memetakan kerangka pikir Bahwa untuk membantu meningkatkan efektivitas kerja pegawai tentunya diperlukan pemerintahan yang baik, hal ini perlunya adanya hubungan antara pemerintahan yang baik dengan efektivitas supaya pemerintah dalam pengelolaan sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeleruh.

Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas, maka disusun paradigma pemikian sebagai berikut :

#### Dimensi Efektivitas

1. Standar waktu yang telah di tetapkan
2. Hasil pekerjaan yang akan di capai
3. Biaya pengeluaran sesuai dengan rencana

**Prinsip – Prinsip**

 ***Good Governance***

1. *Transparency* (Transparansi)
2. *Effectiveness and Efficiency* (Efektivitas dan efisien)
3. *Accountability*(Akuntabilitas)

#### Gambar 1.1 : Paradigma berpikir tentang Good Governance dan Efektivitas Kerja

**Prinsip - Prinsip Good Governance dan Dimensi efektivitas menurut Siagian (1997)**

**Hubungan Good Governance dengan Efektivitas Kerja Pegawai**

Organisasi publik setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan sumber daya manusia yakni aparatur pemerintah daerah yang mampu mewujudkan karakteristik *Good Governance*. Perubahan paradigmaorganisasi yang memerlukan pendekatan baru di dalam pengelolaanya adalah pendayahgunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa efektivitas organisasi tidak lepas dari efektivitas kerja pegawai sebagai salah satu unsur organisasi, memeganng peranan penting dalam usaha mencapai tujuan organisasi.

Pemikiran Peneliti

Dari referensi para pakar di atas, peneliti menduga ada hubungan antara *good governance* dengan efektivitas kerja pegawai pada Bagian Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Peneliti menggambarkan sebagai berikut :

**Gambar 1.2**

**Hubungan Good Governance dan Efektivitas Kerja Pegawai**

**Feed Forward**

**Output**

Efektivitas Kerja Pegawai pada Bagian Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat

**Input**

* UU No. 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah.
* Peraturan Daerah Jawa Barat No. 79 Tahun 2016 tentang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat
* Teori Good Governance
* Teori Efektivitas Kerja Pegawai
* Existing (Kasus)

**Proses**

Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan terkait Good Governance dan Efektivitas Kerja

**Feed Back**

**G. Lokasi dan Lamanya Penelitian**

Lokasi Penelitian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat di Jl. Diponegoro No. 22 Kota Bandung, Jawa Barat. Kode pos : 40115

**Jadwal Penelitian**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kegiatan | Tahun | 2018 |
| Bulan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
| Minggu | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1. | **TAHAPAN PERSIAPAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Perizinan
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Penjajagan
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pengajuan Judul
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Studi Kepustakaan
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pembuatan Proposal
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Perbaikan Proposal
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **TAHAP PELAKSANAAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Observasi
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Penyebaran Angket
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Wawancara
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pengumpulan Angket
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.  | **TAHAP PENYUSUNAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pengolahan Data
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Analisis Data
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pembuatan Laporan
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **TAHAP PENGUJIAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pengolahan Laporan
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Perbaikan Laporan
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Sidang/Seminar
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |